

**PERJUANGAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN DALAM
MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA 1912-1923**

RINGKASAN SKRIPSI



**Oleh :
Nur Febriyanto
13407141012**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

PERJUANGAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN DALAM MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA 1912-1923

Oleh : Nur Febriyanto dan Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian atas sejarah tokoh K.H. Ahmad Dahlan dalam bidang politik, yang sejak awal pendirian Muhammadiyah telah bersinggungan dengan politik. Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk: 1. Mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Ahmad Dahlan, 2. Mengetahui situasi politik awal abad 20, 3. Menganalisa dan mengetahui gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah tahun 1912-1923.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Heuristik, merupakan tahapan peneliti dalam mengumpulkan sumber, 2. Kritik sumber, merupakan tahapan untuk menyaring secara kritis sumber sejarah yang telah didapatkan, 3. Interpretasi, yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan dan menurut kaidah yang sudah ditentukan, 4. Historiografi, yaitu tahap akhir peneliti dalam menyajikan semua fakta dalam sebuah tulisan sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dengan nama Muhamad Darwis. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan (stagnasi), kebodohan, serta keterbelakangan. 2. Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi pada awal abad 20. Pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan terhadap para haji, karena para haji dianggap sebagai biang keladi pemberontakan yang pernah terjadi. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk menekan dan membatasi ruang gerak islam. 3. Gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dimulai ketika proses pengajuan badan hukum Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam merespons kebijakan politik ordonansi guru K.H. Ahmad Dahlan melalui utusannya untuk mencabut ordonansi guru tersebut. Kemudian kebijakan ordonansi haji, K.H. Ahmad Dahlan melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan perhajian, sehingga pada tahun 1922 *Volksraad* mengadakan perubahan bahan dalam ordonansi haji dan memunculkan *Pilgrim Ordonantie* 1922.

Kata kunci: *Perjuangan Politik, K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah.*

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik etis di tanah jajahannya sebagai politik balas budi, sehingga orang Indonesia dilibatkan dalam hal yang menjadi kepentingannya. Politik Etis resmi menjadi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kolonialisme baru. Kebijakan politik etis bidang pendidikan bertujuan untuk menghasilkan elite baru yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi tidak sedikit kaum elite yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu memicu kaum elite terpelajar pribumi berbalik memimpin gerakan anti penjajahan.¹

Perubahan arah politik kolonial dan semakin buruknya kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya menyebabkan kebangkitan Islam Nusantara.² Hal ini mendorong penduduk pribumi untuk mengubah perjuangan melawan Belanda dari strategi militer ke perlawanan yang damai dan terorganisir.³ Pada awal abad ke-20 kesadaran rakyat Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai hal. Muncul berbagai organisasi-organisasi yang terorganisasi dan strategis yang membawa arah perubahan kedepannya. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan, diantaranya adalah Muhammadiyah.⁴

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H. bertepatan dengan 18 November 1912 M. di Yogyakarta. Amal usaha Muhamadiyah menjadikan organisasi ini mewujudkan dalam bentuk gerakan *civil society* lewat gerakan dakwah. Keberadaannya sebagai *civil society* (organisasi kemasyarakatan) yang mencurahkan perhatian utamanya pada

¹ M. C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi, 2005), hlm. 336-337.

² Husain Haikal, “Dinamika Muhammadiyah Menuju Indonesia Baru”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (No. 25, th ke-6, September 2000), hlm. 431.

³ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 87.

⁴ Husain Haikal, “Sayap Pembaharu & Tradisional Islam (Mitos atau Realitas?)”, *Al-Jami'ah*, (No. 2, Vol. 38, Tahun 2000), hlm. 421.

bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Sebagai organisasi masyarakat atau *civil society* Muhammadiyah telah menjalankan politiknya, dalam kehidupan nasional Muhammadiyah telah berkiprah untuk pergerakan kebangkitan kebangsaan, meletakkan fondasi Negara dan cita-cita kemerdekaan, serta memelihara politik Islam.⁵

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dikarenakan K.H. Ahmad Dahlan merasa sedih dan gelisah melihat keadaan kaum Muslim Indonesia dan khususnya di Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam sebagai akibat rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki.⁶ Faktor eksternal yaitu semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia, dan pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Pada awal pendiriannya perkumpulan ini hanya bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan saja, namun bukan berarti tidak bergerak dalam bidang politik.⁷

Dalam perjalanan kehidupan K.H. Ahmad Dahlan tidak lepas dari pergerakan politik dan komunikasi politik demi tercapainya tujuan mendirikan Muhammadiyah. Komunikasi politik intensif dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan beberapa organisasi sosial. Hubungan dan komunikasi politik tersebut ketika Budi Utomo mengambil peran dalam proses permohonan pendirian Muhammadiyah kepada pemerintah. Pada ranah politik, ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial dalam taktik Muhammadiyah memilih politik *kooperatif*, ketika kebanyakan perkumpulan dan pergerakan memilih *non-kooperatif*.⁸

⁵ Hedar Nashir, *Muhammadiyah Abad Kedua*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 53-54.

⁶ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 24.

⁷ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1996), hlm. 68-71.

⁸ Zuli Qodir, dkk. *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Asmaul Husna*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 35

Dalam praktik politik sehari-hari K.H. Ahmad Dahlan, selalu menjalin hubungan bahkan menjadi bagian dari pihak-pihak yang memiliki pilihan beda tersebut. K.H Ahmad Dahlan menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh Budi Utomo seperti dr. Wahidin Soediro Hoesodo. Bahkan K.H. Ahmad Dahlan pernah menjadi Penasehat Boedi Oetomo. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI) seperti, H.O.S Tjokro Aminoto. K.H Ahmad Dahlan juga pernah menjadi anggota dan Penasehat organisasi ini. Pada waktu Sarekat Islam (SI) mengadakan kongres di Cirebon tahun 1921, Muhammadiyah membantu penyelenggaraannya K.H Ahmad Dahlan diminta memberi prasaran.⁹

Berdirinya Muhammadiyah bermula dari perbincangan K.H. Ahmad Dahlan dan Organisasi Budi Utomo. Pertemuan K.H. Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo dimulai tahun 1909 melalui Djojosumarto. Pertemuan itu menyebabkan K.H. Ahmad Dahlan ditunjuk sebagai penasihat masalah-masalah agama. Melalui posisi ini K.H. Ahmad Dahlan memulai sasaran gandanya yaitu mempelajari ilmu keorganisasian dan mengaktualisasikan ajaran Islam.¹⁰ Sebelum Muhammadiyah tersebar merata di seluruh Indonesia, K.H. Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai upaya legalisasi terhadap organisasi yang baru didirikannya itu.

Upaya untuk mengeksistensikan gerakan politiknya K.H. Ahmad Dahlan pertama kali dapat ditelusuri ketika berusaha mencari pengakuan badan hukum oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang akhirnya Muhammadiyah mendapat pengesahan dari permohonannya, tepatnya tanggal 22 Agustus 1914 dan ditetapkan melalui peraturan *Besluit* No.81. Meski statusnya sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah justru lebih banyak bersinggungan dengan politik praktis.¹¹

⁹ Naskah “Tali Pengikat Hidup Manusia” yang disampaikan dalam Konggres Tahunan Muhammadiyah bulan Desember 1922 dan “Peringatan Bagi Sekalian Muslimin (Muhammadiyyin)” sebagai naskah prasaran dalam Kongres Islam Cirebon 1921. Lihat juga dalam, Leny Marlina, Leny Marlina, “Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah”, *TA'DIB*, Vol. XVII, No. 01, Edisi Juni 2012, hlm. 108.

¹⁰ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 24-27.

¹¹ *Ibid.* hlm. 84.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹² Telaah terhadap pustaka atau literatur tersebut, dapat berguna sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah. Kajian pustaka dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan.

K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah bernama “Raden Ngabei Ngabdul Darwis” kemudian dikenal dengan nama Muhammad Darwisy.¹³ Ayahnya seorang alim bernama K.H. Haji Abu Bakar bin K.H. Haji Sulaiman, seorang Khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri Haji Ibrahim bin K.H. Haji Hassan, pejabat penghulu kesultanan. Dalam silsilah ia termasuk keturunan kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa.¹⁴

K.H. Ahmad Dahlan belajar mengaji Quran pada ayahnya, sedangkan belajar kitab pada guru-guru lain. Pada tahun 1890, K.H. Ahmad Dahlan berangkat ke Mekkah untuk melanjutkan studinya dan bermukim di sana selama setahun. Merasa tidak puas dengan hasil kunjungannya yang pertama, maka pada tahun 1903, K.H. Ahmad Dahlan berangkat lagi ke Mekkah dan menetap selama dua tahun. Di Mekkah beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji saja, tetapi juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada beberapa guru spesialis, dalam ilmu fiqih berguru kepada Kyai Machful Tremas, Kyai Muhtaram

¹² Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 6.

¹³ Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih dan Reformasi Soaial Budaya Kyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005), hlm. 3.

¹⁴ Junus Salam, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: TB Yogyta, 1968), hlm. 6.

Banyumas, Syeikh Shaleh Bafadhal, Syeikh Sa'id Jamani, Syeikh Sa'id Babusyel. Dalam ilmu hadish berguru kepada Mufti Syafi'i. Kiyai Asy'ari Baweyan dalam ilmu Falak (Cakrawala) dan Syeikh Ali Mishri Mekkah dalam ilmu Qira'at.¹⁵

Pada permulaan abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik etis di tanah jajahannya sebagai politik balas budi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kolonialisme baru. Kebijakan politik etis bidang pendidikan bertujuan untuk menghasilkan elite baru yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi tidak sediki kaum elite yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu memicu kaum elite terpelajar pribumi berbalik memimpin gerakan anti penjajahan.¹⁶

Awal abad ke-20 kesadaran rakyat Indonesia mengalami peningkatan di berbagai hal. Muncul berbagai organisasi-organisasi yang terorganisasi dan strategis yang membawa arah perubahan kedepannya. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan, diantaranya adalah Muhammadiyah.¹⁷ Pertemuan K.H. Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo dimulai tahun 1909 melalui Djojosumarto. Pertemuan itu menyebabkan dirinya tertarik dengan organisasi tersebut. K.H. Ahmad Dahlan ditunjuk sebagai penasihat masalah-masalah agama. Melalui posisi ini K.H. Ahmad Dahlan memulai sasaran gandanya yaitu mempelajari ilmu keorganisasian dan mengaktualisasikan ajaran Islam.¹⁸

Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908, membuat K.H. Ahmad Dahlan beserta teman-temannya di Kauman mulai bergabung. Berdirinya Muhammadiyah bermula dari perbincangan K.H. Ahmad Dahlan dan Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern saat itu yang digunakan K.H. Ahmad Dahlan

¹⁵ A. Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah –Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara. 1990). hlm. 7.

¹⁶ M. C. Riklefs *op.cit.* hlm. 336-337.

¹⁷ Husain Haikal, "Sayap Pembaharu & Tradisional Islam (Mitos atau Realitas?)", *Al-Jami'ah*, (No. 2, Vol. 38, Tahun 2000), hlm. 421.

¹⁸ Syarifuddin Jurdi, *op.cit.* hlm. 24-27.

sebagai pintu gerbang membuka jalan bagi berdirinya Muhammadiyah.¹⁹ Untuk mewujudkan cita-citanya KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuten Muhammadiyah" (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam "Statuten Muhammadiyah" yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal Miladiyah yaitu 18 November 1912.²⁰

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk tulisan.²¹ Seorang sejarawan dalam memulai penulisan sejarah, harus mengumpulkan sumber secara sistematis yang berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lampau. Metode penelitian sejarah kritis terdiri dari empat tahapan penelitian, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah. Heuristik merupakan kegiatan pengumpulan sumber yang digunakan dalam penelitian.²² Sumber yang digunakan dalam

¹⁹ M. Nasruddin Anshoriy Ch, *Matahari Pembaharuan : Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Yogya Bangkit Publisher, 2010), hlm. 61.

²⁰ Tim Pembina Al-Islam dan KeMuhammadiyah, *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*, (Yogyakarta: PT TIARA WACANA YOGYA, 1990), hlm. 3.

²¹ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

²² Luois Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI Press, 1985), hlm. 94.

penulisan ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari tangan pertama, atau langsung dibuat (waktu sama) dengan peristiwa yang dikaji. Sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini berupa:

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1912

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1914

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1921

EXTRACT uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Buitenzorg, den 22 sten Augustus 1914, No. 81.

UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 16 Augustus 1920, No. 40.

UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 2 September 1921, No. 36.

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan dari pelaku atau saksi atau kata lain pengkisah hanya tau peristiwa dari pelaku atau saksi.²³

Sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

Ahmad Faizin Karimini, *Pemikiran dan Perilaku Politik K.H. Ahmad Dahlan*, (Gresik : MUHI Press, 2012)

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1985).

Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Junus Salam, *Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: TB Yogya, 1968).

M. Nasruddin Anshoriy Ch, *Matahari Pembaharuan : Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Yogya Bangkit Publisher, 2010).

Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah - Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

²³ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 57.

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

2. Kritik Sumber

Setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian. Langkah selanjutnya harus menyaring secara kritis terutama terhadap sumber primer, agar kemudian terjaring fakta-fakta sejarah yang menjadi pilihannya.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti harus mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Terhadap sumber-sumber primer maupun sumber sekunder, kritik ekstern berkaitan dengan otentitas atau keaslian sumber sedangkan kritik intern lebih berkaitan dengan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai.

3. Interpretasi

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Penafsiran ini sendiri dilakukan terhadap sumber-sumber yang ditemukan. Dalam melakukan penafsiran, seorang peneliti sejarah harus melakukan analisis sesuai dengan fokus penelitiannya. Dengan adanya penafsiran ini, diharapkan penulisan sejarah akan lebih bersifat objektif dalam batas keilmiahannya. Sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh.²⁵ Tahap ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menghubungkan fakta dalam latar belakang, proses pembentukan, serta peranan politik K.H. Ahmad Dahlan.

4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi yaitu langkah terakhir dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah yang kronologis dan sistematis. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting.²⁶ Dari

²⁴ Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2007), hlm. 131.

²⁵ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta: TW, 2008), hlm. 101

²⁶ *Ibid*, hlm. 104.

tahap pengumpulan sumber, menilai sumber dan menafsirkan sumber. Historiografi merupakan tahap terakhir yaitu menentukan data-data yang sudah ada menjadi sebuah kisah sejarah dalam bentuk sebuah tulisan yang bisa dibaca oleh banyak orang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. RIWAYAT HIDUP K.H. AHMAD DAHLAN

A. Riwayat Hidup K.H Ahmad Dahlan

K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dengan nama Muhamad Darwis. Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, seorang khatib tetap di masjid Sultan dikota tersebut. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, adalah anak seorang penghulu di Kraton Yogyakarta, Haji Ibrahim.²⁷ K.H. Ahmad Dahlan adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara. Adapun saudara Muhammad Darwis menurut urutannya adalah: (1) Nyai Chatib Arum, (2) Nyai Muhsinah (Nyai Nur), (3) Nyai H. Sholeh, (4) M. Darwis (K.H.A. Dahlan), (5) Nyai Abdurrahman, (6) Nyai H. Muhammad Fekih (Ibu H. Ahmad Badawi), dan (7) Muhammad Basir.²⁸

K.H. Ahmad Dahlan berasal dari keluarga berpengaruh dan terkenal di lingkungan kesultanan Yogyakarta, yang secara biografis silsilahnya dapat ditelusuri sampai pada Maulana Malik Ibrahim.²⁹ Dengan terdapatnya nama Maulana Ibrahim dalam garis keturunannya maka dapat dikatakan bahwa ia lahir dalam suatu lingkungan keislaman yang kukuh. Silsilah K.H. Ahmad Dahlan hingga Maulana Malik Ibrahim melalui 12 keturunan, yaitu Muhammad Darwis putra H. Abu Bakar, putra K.H Muhammad Sulaiman, putra Kyai Murtadla, putra Kyai Ilyas, putra Demang Jurang Juru Kapindo, putra Jurang Juru Sapisan, putra

²⁷ Mansur, dkk, *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005), hlm. 86.

²⁸ Muhammad Soedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²⁹ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2007), hlm. 293.

Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig, putra Maulana Muhammad Fadlullah (prapen), putra Maulana ‘Ainul Jaqin, putra Maulana Ishaq, dan putra Maulana Ibrahim.³⁰

Hal ini diperkuat lagi dengan lingkungan tempat K.H. Ahmad Dahlan lahir dan dibesarkan yaitu kampung Kauman. Kampung Kauman seperti kebanyakan bagian Yogyakarta yang lain merupakan basis yang kuat bagi kaum santri. Walaupun dapat pula ditemukan pemukiman santri yang tersebar di beberapa bagian daerah lain di Yogyakarta, Kauman cukup unik karena hampir semua yang tinggal disitu adalah santri. Kampung Kauman sebagai tempat kelahiran dan tempat K.H. Ahmad Dahlan dibesarkan, dengan demikian merupakan lingkungan keagamaan yang sangat kuat, yang berpengaruh besar dalam hidupnya. Kauman yang letaknya dekat dengan masjid, sehingga masa kecil K.H. Ahmad Dahlan sangat rajin dalam menuntut ilmu agama.

K.H. Ahmad Dahlan kemudian menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Penghulu Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah.³¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, K.H. Ahmad Dahlan berdagang batik. Seperti ulama-ulama lainnya, K.H. Ahmad Dahlan juga berdagang batik. K.H. Ahmad Dahlan sering bepergian ke Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan ke Sumatra Utara untuk urusan dagangannya. Disetiap kota yang dikunjunginya, selain berdagang K.H. Ahmad Dahlan juga menemui alim ulama di sana untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran tentang ajaran agama dan keadaan umat Islam Indonesia.³²

³⁰ Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhamadiyah*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1989), hlm. 53-54.

³¹ Junus Salam, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: TB Yogya, 1968), hlm. 9.

³² M. Nasruddin Anshoriy Ch, *op.cit*, hlm. 102.

B. Latar Belakang Pendidikan K.H Ahmad Dahlan

K.H. Ahmad Dahlan pada waktu kecil tinggal di kampung Kauman. Seperti pembahasan yang sedikit disinggung diatas, bahwa kampung Kauman anti dengan penjajah. Suasana seperti ini tidak memungkinkan bagi K.H. Ahmad Dahlan untuk memasuki sekolah yang dikelola oleh pemerintah penjajah. Pada waktu itu siapa yang memasuki sekolah *Gubernamen*, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah jajahan, dianggap kafir atau kristen. Sebab itu K.H. Ahmad Dahlan tidak menuntut ilmu pada sekolah *Gubernamen*, ia mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan dari ayahnya sendiri.³³

Setelah dewasa barulah K.H. Ahmad Dahlan diserahkan kepada Kyai Haji Muhammad Soleh untuk belajar ilmu Fiqih (hukum agama Islam) dan kepada Kyai Haji Muchsin untuk belajar ilmu Nahwu dan *Shorof* (struktur dan tata bahasa arab) serta kepada Syeikh Amin dan Syeikh Sayyid Bakri Syata' untuk belajar ilmu *Qiro'atul qur'an* (membaca Al Qur'an).³⁴ Untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya diserahkan kepada para ulama lainnya seperti Kyai Haji Muhammad Nur (*Hoofd* Panghulu Hakim Kota Yogyakarta) dan Kyai Haji Abdul Hamid dari kampung Lempuyangan Wangi Yogyakarta.³⁵

Ilmu hadits (riwayat sabda Nabi Muhammad SAW) beliau pelajari dari Kyai Haji Mahfudz dan Syeikh Khayyat. Bahasa Melayu (Indonesia) dipelajarinya dari R. Ngabehi Sosrosoegondo, guru di *Kweekschool Gubernemen* di Yogyakarta dan bahkan ia mempelajari ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan hewan berbisa dari Syeikh Hassan. Disamping itu dia juga berguru kepada R. Wedana Dwijosewoyo dan Syekh M. Jamil Jambek dari Bukit Tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di madrasah dan pesantren di Yogyakarta dan sekitarnya, di saat usianya mencapai 22 tahun K.H. Ahmad Dahlan berangkat ke Mekkah untuk pertama kali

³³ Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 39.

³⁴ Ahmad Adaby Darban, *op. cit.* hlm. 103.

³⁵ Muhammad Soedja', *op. cit.* hlm. 202.

pada tahun 1890. Selama setahun beliau belajar dan memperdalam ilmu agama di Mekkah.³⁶

Merasa pengetahuan yang dikuasainya belum cukup, maka pada tahun 1903 beliau kembali ke Mekkah bersama putranya yang baru berumur 6 tahun (Muhammad Siradj) untuk menuntut ilmu dan melaksanakan haji untuk kedua kalinya. Di Mekkah beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji saja, tetapi juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada beberapa guru spesialis, dalam ilmu fiqh berguru kepada Kyai Machful Tremas, Kyai Muhtaram Banyumas, Syekh Shaleh Bafadhal, Syekh Sa'id Jamani, Syekh Sa'id Babusyel. Dalam ilmu hadish berguru kepada Mufti Syafi'i. Kiyai Asy'ari Baweyan dalam ilmu Falak (Cakrawala) dan Syekh Ali Mishri Mekkah dalam ilmu Qira'at.³⁷

Namun yang paling utama adalah perjumpaannya dengan Rasyid Ridha, seorang tokoh pembaruan Islam dari Mesir yang juga murid dari Syekh Muhammad Abduh Serang yang banyak dirujuk sebagai Modernis Islam asal Mesir. Terdapat kesamaan pandangan antara pembaharu Islam itu dengan K.H. Ahmad Dahlan yang menitikberatkan pada pemurnian *Tauhid* (keesaan Allah Swt) dan bukan keimanan secara *Taqlid*.³⁸

C. Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan K.H. Ahmad Dahlan

Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan (stagnasi), kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Latar belakang situasi tersebut telah mengilhami munculnya ide pembaharuan K.H.

³⁶ Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, dalam Perspektif Historis dan Ideologis* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003) hlm. 104.

³⁷ A. Munir Mulkhan *op.cit.* hlm. 7.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis–Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012) hlm. 163.

Ahmad Dahlan.³⁹ Selain itu didukung pula dengan pengalamannya, dua kali di Mekah belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, belajar Ilmu Tauhid, Fikih, Tasawuf, Falah dan yang menarik hatinya adalah Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Pengalaman tersebut berpengaruh pada ide-ide pembaharuan K.H. Ahmad Dahlan. Selain itu keprihatinan K.H. Ahmad Dahlan melihat kondisi Islam di Indonesia sehingga ia bertekad untuk bekerja keras mengembalikan Islam sebagaimana landasan aslinya yaitu Al Qur'an dan hadis.

Keadaan umat Islam yang memprihatinkan khususnya di lingkungannya dalam kondisi kebodohan. Pemahaman ajaran Agama Islam pada waktu itu sudah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya yakni tidak sesuai dengan Al Qur'an dan Al- Hadist. Pemahaman Islam sudah bercampur dengan *bid'ah*, *tahayul* dan *khufarat*. Hal tersebut menumbuhkan hasrat dari K.H. Ahmad Dahlan untuk memperbaikinya. Pembaharuan K.H. Ahmad Dahlan bertujuan untuk memperbaiki pemahaman, peribadatan, dan itikat umat Islam di Indonesia agar dapat sesuai Al Qur'an dan sunnah Rosul, sehingga dengan cara demikian Islam mampu mencapai kemajuan.⁴⁰ K.H. Ahmad Dahlan beranggapan, bahwa upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan.

2. SITUASI POLITIK AWAL ABAD 20

A. Politik Kolonial Hindia Belanda

Kebijakan politik Pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad ke-20 mengalami perubahan. Berkuasanya kaum liberal di parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan kesejahteraan. Berubahnya kebijakan

³⁹ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). hlm. 103.

⁴⁰ Nor Tofik, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : UIN. 1992), hlm. 55.

pemerintah Belanda terhadap Hindia-Belanda tidak lepas dari peranan para tokoh, antara lain Van Deventer, P. Brooshooft, dan Van Limburg Stirum.⁴¹

Perubahan arah politik di negeri Belanda mulai berubah setelah pemilihan umum tahun 1901. Partai Liberal yang menguasai politik selama lima puluh tahun telah keluar dari arena politik, dan sibuk dengan kitab tuntunan dan agama telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisi. Kedua kelompok tersebut menetapkan untuk kembali kepada prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan. Pidato tahunan kerajaan bulan September 1901 telah menunjukkan semangat Kristen ketika Ratu berkata tentang suatu kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia-Belanda. Berdasarkan pidato Ratu tersebut diberlakukanlah di Hindia-Belanda.⁴²

Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar kebijakan baru tersebut: *edukasi, emigrasi, dan irigasi* (pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan). Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana. Oleh karena itulah, maka hutang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta *gulden* diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa harus dibebani hutang lagi, dan Politik Etis mulai berjalan. Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.⁴³

Kemudian awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Pemerintah kolonial terkenal dengan sistem sentralisasinya yang ekstrem, birokrasinya yang kaku, dan otokrasinya yang mutlak. Dengan adanya perubahan di dalam tata pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903 maka sistem

⁴¹ Elsbeth Locher Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*. Terj. Nicolette P. Ratih, (Jakarta: Djambatan, 1996). hlm. 39.

⁴² Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Terj. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984). hlm. 51.

⁴³ Amir Sutarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.176.

desentralisasi mulai dilaksanakan, yang konsesinya di satu pihak memberi otonomi lebih banyak kepada pemerintah daerah dan di lain pihak mendirikan badan-badan perwakilan.⁴⁴

B. Kebijakan Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda

Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda tentang Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi pada masa itu, baik pemerintah Hindia Belanda maupun umat Islam Indonesia masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Pada satu pihak pemerintah Hindia Belanda selalu berupaya untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, di lain pihak umat Islam Indonesia selalu berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan penjajah. Pada umumnya mereka takut pada ungkapan-ungkapan apa yang disebut dengan fanatisme Islam, sehingga mereka berusaha menekan dan mencegah dengan cara menjauhkan diri dari urusan-urusan mengenai Islam.⁴⁵

Sebelum kedatangan C. Snouck Hurgronje ke Indonesia, pemerintah kolonial Belanda merasa takut dan khawatir terkait masalah Islam sehingga merumuskan tiga kebijakan pokok. Pertama, pemerintah Belanda harus mengadakan aliansi dengan para pangeran, priyai, raja atau sultan maupun kepala adat pribumi, karena mereka tidak terlalu fanatik bahkan anti Islam. Kedua, pemerintah kolonial Belanda harus mengadakan proses pengkristenan kepada sebagian besar masyarakat pribumi guna menghilangkan pengaruh Islam. Ketiga, pemerintah Belanda harus membatasi orang Islam pergi haji ke Mekkah karena orang haji dianggap biang keladi menyebarkan agitasi dan pemberontakan di Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ Elsbeth Locher Scholten, *op.cit.*, hlm.39.

⁴⁵ Pijper. G.F., "Politik Islam Pemerintah Belanda", dalam *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, ed. H. Baudet dan I.J. Brugmans (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 239.

⁴⁶ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), hlm. 38-39.

Kenyataannya, sejak kekuasaan kolonial Belanda, berbagai gerakan dan pemberontakan di Hindia Belanda bermunculan, sebagaimana menurut Clifford Geertz, pemberontakan besar dalam melawan penjajah yakni; pemberontakan kaum Padri di Sumatra, pemberontakan Diponegoro di Jawa, pemberontakan Banten di Jawa Barat, dan pemberontakan Aceh. Pemberontakan yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan gerakan yang ditujukan oleh kaum muslimin yang dimotori oleh para haji dan ulama.⁴⁷

Akibat terjadinya berbagai perlawanan oleh kaum haji dan ulama terhadap kolonial, sehingga Pemerintahan Hindia Belanda berusaha membatasi perjalanan haji ke Mekkah. Kepercayaan masyarakat yang terlalu fanatik pada haji yang ditakutkan Belanda dapat membawa pengaruh negatif bagi eksistensinya di negeri Hindia Belanda. Terutama dalam masalah perhajian, para haji dicurigai, dianggap fanatik dan sering memberontak. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan berbagai aturan, yang bertujuan untuk membatasi dan mempersulit umat Islam ke Mekkah. Oleh karena itu, untuk lebih membatasi gerak umat Islam, dikeluarkanlah *Ordonansi* yang antara lain berisi, larangan bagi umat Islam Indonesia pergi ke Mekkah jika tidak mempunyai pas jalan.⁴⁸

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa kebijakan yang jelas mengenai Islam. Snouck Hurgronje berusaha mendudukan masalah antara ibadah haji dan fanatisme. Menurutnya, haji-haji itu tidak berbahaya bagi kedudukan pemerintahan kolonial di Indonesia, yang mungkin sekali berbahaya ialah apa yang disebutnya sebagai *koloni Jawa*, yaitu daerah tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Indonesia di Mekah. Di sana mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha *Pan-Islamisme*.⁴⁹ Dengan begitu

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 15.

⁴⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1985). hlm. 10.

⁴⁹ Deliar Noer, op. cit., hlm. 33.

haji sangat ditakuti, *hajiphobia* sebagai bagian dari *Islamophobia*. Dikarenakan adanya pandangan seperti itu maka orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penguasa Belanda.⁵⁰

C. Kebijakan Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda

Maka pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa aspek politik dari Islam dan hubungan politik saja yang dianggap berbahaya. Oleh karena itu harus diawasi dan ditindak secara tegas. Pada waktu itu, ada dua isu politik Islam yang dianggap penting, yakni Pan Islamisme dan nasionalisme. Dari segi politik haji, kedua isu tersebut dikaitkan dengan ibadah haji dan orang yang naik haji. Politik haji pada awal abad ke-20 lebih mengarah pada pengawasan terhadap pengaruh kedua gerakan politik, yaitu Pan Islamisme dan nasionalisme.⁵¹

Awal abad 20 ditandai dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam Indonesia yang pergi haji dan yang bermukim di Mekkah, mendorong pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan politik, guna membendung gerakan-gerakan yang nantinya akan merusak kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyadari ketidakpeduliannya selama ini terhadap perjalanan haji umat Islam Indonesia, secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme sehingga bisa mengancam eksistensi politik pemerintah Hindia Belanda.⁵²

Akibat dari semakin banyaknya jumlah jamaah haji yang datang ke Mekkah, tidak sedikit dari para jamaah haji pulang dengan membawa ajaran ortodoks setelah menunaikan ibadah haji atau setelah sekian lama bermukim di tanah suci. Pemerintah Belanda juga melihat bahwa banyaknya perlawanan rakyat yang

⁵⁰ Yudha, "Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900-1945)", *THAQAFIYYAT.*, Vol. 16, No. 1, Juni 2015, hlm. 39.

⁵¹ Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta : Lkis, 2007), hlm. 119.

⁵² M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), hlm. 84.

ditujukan kepada pemerintah Belanda memang banyak yang dimotori dan dipimpin oleh para haji. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa ibadah haji adalah penyebab penduduk pribumi menjadi fanatik dan akan menentang pemerintah Belanda, sehingga akan membahayakan kedudukannya di tanah air. Oleh sebab itu, pihak pemerintah Belanda mengeluarkan bermacam-macam peraturan yang dapat membatasi dan mempersulit ibadah haji. Diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan tentang ordonansi haji dan ordonansi guru agama.⁵³

3. GERAKAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN

A. Upaya Memperoleh Badan Hukum Muhammadiyah

Dalam rangka pendirian Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan melakukan berbagai langkah sebagai persiapan berdirinya Muhammadiyah. Langkah Pertama, K.H. Ahmad Dahlan menemui dan berdiskusi dengan Budiharjo dan R. Dwijosewojo, guru *kweekschool* di *Gubernement* Jetis. Ini dilakukan setelah mengadakan pertemuan dengan para santrinya. Langkah kedua, K.H. Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang dekat, dan memikirkan bakal berdirinya organisasi tersebut. Agenda pertemuan tersebut membahas mengenai nama perkumpulan, maksud, tujuan, serta tawaran siapa yang bersedia menjadi anggota Budi Utomo.⁵⁴

Langkah ketiga, K.H. Ahmad Dahlan dan ke enam anggota baru Budi Utomo itu mengajukan permohonan kepada *Hoofdbestuur* Budi Utomo supaya mengusulkan berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga dengan keluarnya surat izin tersebut, Muhammadiyah secara resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912.⁵⁵ Langkah keempat, K.H. Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus untuk yang pertama kalinya guna mempersiapkan

⁵³ Suminto, *op. cit.*, hlm. 3.

⁵⁴ Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op. cit.* hlm. 25.

⁵⁵ Syarifuddin Jurdi, *op. cit.* hlm. 80-81.

proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Kemudian memproklamasikan berdirinya Muhammadiyah di gedung pertemuan *Lodge Gebuw* Malioboro.⁵⁶

Pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan badan hukum kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mengirim “*Statuten Muhammadiyah*”. Permintaan izin tersebut baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1914 melalui *Besluit* Gubernur Jenderal No. 81, izin operasi tersebut hanya dibatasi di wilayah Yogyakarta.⁵⁷

K.H. Ahmad Dahlan melihat bahwa perkembangan Muhammadiyah sangat pesat, baik dari dalam maupun dari luar kota Yogyakarta. Sehingga, K.H. Ahmad Dahlan merasa perlu mengajukan izin kepada pemerintah Hindia Belanda, karena mengingat badan hukum yang pertama diberikan hanya sebatas wilayah Yogyakarta saja. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1920, K.H. Ahmad Dahlan kembali mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar ruang geraknya diperluas sampai daerah kekuasaan Hindia Belanda.⁵⁸

Selanjutnya dalam tempo tiga bulan atau tepatnya tanggal 16 Agustus 1920, pemerintah Hindia Belanda menyetujui permohonan Muhammadiyah, lewat *Besluit* No. 40.⁵⁹ Sejak saat itu Muhammadiyah terus berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut didukung dengan diterbitkannya *Gouvernements Besluit* No. 40 tanggal 16 Agustus 1920 yang mengizinkan Muhammadiyah berkembang diseluruh Hindia Belanda. Namun, terdapat perubahan pada artikel 2, mengenai maksud berdirinya Muhammadiyah. Sedangkan artikel 4,5, dan 7 tidak mengalami perubahan.⁶⁰

⁵⁶ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997. hlm. 78.

⁵⁷ *EXTRACT uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Buitenzorg, den 22 sten Augustus 1914, No. 81.*

⁵⁸ Syaifullah, *op. cit.* hlm. 84.

⁵⁹ *UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 16 Augustus 1920, No. 40.*

⁶⁰ *Anggaran Dasar Muhammadiyah 1912, artikel 2.*

Usaha K.H. Ahmad Dahlan tidak berhenti disitu saja, usaha memperoleh pengakuan badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda terus dilakukan. Maka delapan bulan setelah dikeluarkannya *Besluit* No. 40 tanggal 1920, tepatnya tanggal 7 Mei 1921, K.H. Ahmad Dahlan mengajukan kembali permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda melalui Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk mengubah artikel-artikel tersebut. Permohonan tersebut dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda lewat *Besluit* No. 36 bulan September 1921.⁶¹ Sehingga setiap tempat di Hindia Belanda, jika telah memiliki sebelas orang anggota Muhammadiyah, sudah dapat mendirikan cabang Muhammadiyah. Setelah munculnya perijinan tersebut, cabang Muhammadiyah terus berkembang di berbagai daerah, dalam kurun waktu 3 tahun saja Muhammadiyah sudah memiliki 14 cabang.⁶²

B. Reaksi Terhadap Politik Ordonansi Guru

a. Hakekat Politik Ordonansi Guru

Salah satu peraturan yang menguntungkan Belanda dan merugikan umat Islam adalah Ordonansi Guru. Ordonansi Guru yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda ditujukan untuk mengendalikan pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam. Guru-guru agama, dicurigai sebagai ancaman potensial terhadap pemerintah Belanda. Kemunculan kebijakan itu menjadikan iklim penyelenggaraan pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20 sangat diawasi secara ketat. Lembaga pendidikan Islam yang sejatinya menjadi sasaran Ordonansi Guru dan dianggap mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda adalah pesantren yang dipimpin oleh seorang Kyai.⁶³

⁶¹ *UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 2 September 1921, No. 36.*

⁶² Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan "Tajdid" di Indonesia bagian I.* (Bandung: Too Bagus Publishing, 2013), hlm. 200.

⁶³ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 147.

b. Sikap K.H. Ahmad Dahlan

Perlu diketahui pada awal periode kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan tampaknya tidak ada persoalan krusial yang terkait dengan kemunculan Ordonansi Guru. Hal ini disebabkan karena sekolah/madrasah Muhammadiyah pertama kali didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta. Sementara wilayah operasi Ordonansi Guru, sebagaimana disebut di dalam *Staatsblad* 1905 nomor 550 diberlakukan bagi seluruh daerah di Jawa, kecuali daerah yang dikuasai Sultan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.⁶⁴

Walaupun demikian bukan berarti K.H. Ahmad Dahlan tidak menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Sikap akomodatif yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan membuat sekolah-sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta dengan mendapatkan subsidi pemerintah. Setelah dikeluarkannya *Gouvernements Besluit* No 40 tanggal 16 Agustus 1920, yang mengizinkan Muhammadiyah berkembang diseluruh Hindia Belanda, sehingga dengan adanya ordonansi guru 1905 tersebut menghambat perkembangan pendidikan di luar daerah residen Yogyakarta. Situasi tersebut membuat K.H. Ahmad Dahlan untuk menyelesaikan permasalahan ordonansi guru dengan membawa masalah tersebut ke dalam untuk membahas persoalan Ordonansi Guru dalam Kongres al-Islam di Cirebon tahun 1921.⁶⁵

c. Perantara Politik K.H. Ahmad Dahlan

K.H. Ahmad Dahlan mengutus muridnya H. Fachroddin untuk mengatasi masalah ordonansi guru tersebut. K.H. Ahmad Dahlan menunjuk H. Fachroddin untuk membahas persoalan Ordonansi Guru dalam Kongres al-Islam di Cirebon tahun 1921. H. Fachroddin saat itu menyampaikan gagasannya tentang sejarah *Staatsblad* 1905 nomor 550 lahir, pelaksanaannya di lapangan serta dampak-dampak nyata yang telah dialami umat Islam. Setelah melewati proses yang cukup

⁶⁴ Syarifuddin Jurdi, *op. cit*, hlm. 95.

⁶⁵ Alwi Shihab, *op. cit*, hlm. 158.

panjang, pada akhirnya, berdasarkan Rapat Tertutup (Komisi) tanggal 30 Maret 1923 dan Rapat Terbuka (Pleno) tanggal 1 April 1923, Muhammadiyah memutuskan agar Ordonansi Guru tahun 1905 itu dicabut. Pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permohonan Muhammadiyah untuk mencabut Ordonansi Guru tahun 1905. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan regulasi baru melalui *Staatsblad* 925 Nomor 219 tahun 1925.⁶⁶

C. Respon Terhadap Politik Ordonansi Haji

a. Problematika Pelaksanaan Ordonansi Haji

Para haji pergi ke Mekkah tidak hanya untuk berhaji namun untuk mencari ilmu disana dan menerima semangat Pan Islamisme. Sehingga pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Ordonansi Haji, yang isinya merupakan aturan-aturan atau regulasi dalam berhaji. Meskipun sebenarnya isinya cenderung menguntungkan pihak pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penyelenggaraan haji lebih berkonotasi ekonomi dan jauh dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda membiarkan perhajian Indonesia dalam kondisi kurang dan tidak terjamin baik pelayanan maupun kesehatan dan keamanan dalam perjalanannya.⁶⁷

Tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan-pemeriksaan oleh maskapai pelayaran Belanda yang tergabung dalam Kongsi Tiga dan broker-brokernya yang terdiri dari orang-orang pribumi sendiri, penipuan-penipuan para tengkulak haji dan Badal Syekh, serta pemerasan secara legal. Semuanya memperoleh perlindungan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah kolonial dengan kaki tangannya menjadikan urusan haji untuk memperoleh penghasilan (obyek mencari keuntungan materil) dan pemerasan yang sangat empuk. Beberapa calon jamaah bahkan harus meminjam uang terlebih dahulu dengan bunga mahal kepada para broker yang berada di tempat, serta tidak jarang di temukan menyuap

⁶⁶ Farid Setiawan, "Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru", *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume III, No 1, Juni 2014, hlm. 62.

⁶⁷ Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 156.

juru tulis atau penjaga keamanan agar proses administrasi berjalan dengan lancar.

68

b. Usaha Perbaikan Perhajian

Secara resmi tuntutan dan aspirasi perbaikan perjalanan haji Indonesia tertampung dan mulai tahun 1921. K.H. Ahmad Dahlan menuntut Kongsi Tiga, supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penertiban pelayaran di atas kapal. Kemudian tahun 1922 *Volksraad* mengadakan perubahan-perubahan pada *Pilgrims Ordonantie. Hoofdbestuur* Muhammadiyah yakni K.H. Ahmad Dahlan mengutus anggotanya, K.H. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo ke Mekkah untuk meninjau dan mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Wadah gagasan perbaikan, penertiban haji ini diwujudkan pertama kali dalam badan yang disebut penolong haji (PH) di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan.⁶⁹

Penyelenggaraan urusan haji yang sudah dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan berdasarkan fakta-fakta yang ada waktu itu dilanjutkan oleh tokoh umat Islam berjalan hanya beberapa tahun kemudian, dan selanjutnya memutuskan suatu badan yang diberi nama P.H. singkatan dari Penolong Haji, berpusat di kota Yogyakarta. Dari badan “Penolong Haji” ini terbentuk sebuah badan yakni “Comitee Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia” yang anggotanya terdiri dari para ulama dan golongan cerdik pandai. Dengan terbentuknya badan ini diharapkan dapat membeli kapal sendiri.

c. Hasil Tuntutan K.H. Ahmad Dahlan

Hasil tuntutan K.H. Ahmad Dahlan tersebut membuat harga tiket menjadi turun. Sejak dahulu perusahaan-perusahaan Kongsi Tiga berkali-kali mencoba

⁶⁸ Mukhlis Paeni & Tim Penyusun. *Biro Perjalanan Haji Di Indonesia Masa Kolonial: Agen Herklots dan Firma Alsegooff & Co.*(ANRI:Jakarta, 2001), hlm. 24-25.

⁶⁹ Ali Mufrodi, *Haji Indonesia dalam Perspektif Historis*. Disampaikan dalam Peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003. hlm. 14.

mengharuskan Pemerintah Pusat memberlakukan ketentuan karcis pulang-pergi untuk penumpang Haji. Harga karcis pulang-pergi (Jeddah-Batavia) pada musim haji tahun 1913/1914 sebesar f 185 gulden. Dalam ordonansi Haji 1922 ketentuan harga karcis pulang pergi untuk semua perusahaan pelayaran diumumkan oleh Departemen terkait sebesar f 150 untuk tiap-tiap pembelian harus atas nama agen haji resmi.⁷⁰

Setelah di terapkannya ordonansi haji tahun 1922, yang lebih menekankan *higienis* atau peningkatan sarana kesehatan pada semua kapal-kapal pengangkutan jamaah haji, jumlah jamaah haji yang meninggal pun mulai menurun. Pada tahun 1921 ada 3.170 dari 28.839 jamaah haji Indonesia yang meninggal. Namun seiring perbaikan kondisi sanitasi kapal haji sesuai kebijakan pelayaran kapal haji tahun 1922. Dampaknya secara statistik memang angka kematian dalam perjalanan di kapal haji dapat ditekan dan menurun bila pada tahun 1923-1924 kasus kematian mencapai 10% dari seluruh jamaah Haji, maka pada tahun 1926-1932 turun menjadi 1,9 % dari seluruh jamaah Haji.⁷¹

V. KESIMPULAN

K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dan wafat pada jumat malam 7 Rajab tahun 134 Hijriyah (23 Februari 1923) dalam usia 55 tahun. K.H. Ahmad Dahlan adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, ibunya bernama Siti Aminah. K.H. Ahmad Dahlan secara dini mendapat pendidikan dari ayahnya sendiri. Dua kali berangkat ke Mekkah K.H. Ahmad Dahlan untuk melaksanakan haji dan memperdalam ilmu agama di Mekkah. Perjumpaannya dan dialog dengan Rasyid Ridha ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemikiran K.H. Ahmad Dahlan.

⁷⁰ Ahmad Fauzan Baihaqi, “Transportasi Jamaah Haji di Embarkasi/Debakasi Pelabuhan Batavia Tahun 1911-1930”, *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 118.

⁷¹ Shaleh Putuhena, *op. cit.*, hlm. 202.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan terhadap pemerintah Hindia Belanda bercorak “Rival-Moderat”. Se jauh penelusuran peneliti, tidak ditemukan sama sekali bahwa adanya ucapan-ucapan atau pun tulisan-tulisan secara terang-terangan menentang pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bukan berarti K.H. Ahmad Dahlan memihak Belanda. Meski secara lisan ia tidak mengecam Belanda namun gerakannya berorientasi pada kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia jelas merupakan bukti usahanya melawan penjajahan. Jelas sekali terlihat dari berbagai gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan yang terkesan “menghormati” keberadaan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga secara politis K.H. Ahmad Dahlan tidak pernah dibatasi gerakannya oleh pemerintah dan keberadaan Muhammadiyah tidak menjadi ancaman bagi pemerintah.

Sehingga izin pendirian Muhammadiyah diperjuangkan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan bantuan pimpinan Budi Utomo yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Usaha memperjuangkan legalitas gerakan ini berlangsung dalam tiga tahapan. Tahap pertama menghasilkan ruang gerak seluas residensi Yogyakarta. Tahap kedua menghasilkan izin ruang gerak seluas daerah kekuasaan Hindia Belanda dan tahap ketiga pendirian cabang-cabang Muhammadiyah di manapun di daerah kekuasaan Hindia Belanda.

Kemudian penerbitan ordonansi guru yang bersifat politis, yang bertujuan untuk melakukan kontrol atas lembaga pendidikan yang dicurigai sebagai ancaman potensial terhadap pemerintah.. Tahun 1921 Fachroddin sebagai utusan K.H. Ahmad Dahlan membahas persoalan tersebut dalam Kongres al-Islam di Cirebon. Berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji oleh Hindia Belanda membuat kecewa umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan menuntut Kongsi Tiga, supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penertiban pelayaran di atas kapal. *Hoofdbestuur* Muhammadiyah mengutus anggotanya, K.H. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo ke Mekkah untuk meninjau dan mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Wadah gagasan perbaikan, penertiban haji ini diwujudkan pertama kali dalam badan yang disebut penolong haji (PH) di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1912

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1914

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1921

EXTRACT uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Buitenzorg, den 22 sten Augustus 1914, No. 81.

UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 16 Augustus 1920, No. 40.

UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 2 September 1921, No. 36.

Buku-Buku:

Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005).

Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan "Tajdid" di Indonesia bagian I.* (Bandung: Too Bagus Publishing, 2013).

Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: Mizan, 1998).

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1985).

Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1996).

Hedar Nashir, *Muhammdiyah Abad Kedua*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011).

Junus Salam, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: TB Yogya, 1968).

M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008).

- M. Nasruddin Anshoriy Ch, *Matahari Pembaharuan : Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Yogya Bangkit Publisher, 2010).
- Muhammad Soedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993).
- Mukhlis Paeni & Tim Penyusun. *Biro Perjalanan Haji Di Indonesia Masa Kolonial: Agen Herklots dan Firma Alsegooff & Co.*(ANRI:Jakarta, 2001).
- Nor Tofik, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : UIN. 1992).
- Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta : Lkis, 2007).
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: 1966-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).
- Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhamadiyah*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1989).
- Zuli Qodir, dkk. *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Asmaul Husna*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).

Skripsi :

- Ahmad Fauzan Baihaqi, "Transportasi Jamaah Haji di Embarkasi/Debarkasi Pelabuhan Batavia Tahun 1911-1930", *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015).
- Aji Digdaya, "Peran Muhammadiyah Dalam Pergerakan Di Yogyakarta 1912-1945", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2012).
- Annisa Triana, "Peran Muhammadiyah Dalam Bidang Politik Di Yogyakarta Tahun 1945-1968", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2014).

Miftahul Jannah, “Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam Indonesia”, *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, Surabaya, 2014).

Nor Tofik, “Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN. 1992).

Yutandes Titin Rohmaenah, “Kampung Kauman Yogyakarta : Studi Tentang Perkembangan Muhammadiyah (1912-1923)”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2010).

Jurnal :

Ali Mufrodi, *Haji Indonesia dalam Perspektif Historis*. Disampaikan dalam Peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

Farid Setiawan, “Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru”, *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume III, Nomor 1, Juni 2014 52.

Hikmawan Syahputra, “Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Malang : Universitas Brawijaya Malang, 10 September 2014).

Husain Haikal, “Dinamika Muhammadiyah Menuju Indonesia Baru”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (No. 25, th ke-6, September 2000).

Leny Marlina, “Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah”, *TA'DIB*, Vol. XVII, No. 01, Edisi Juni 2012.

Yudha, Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900-1945)., “*THAQAFIYYAT*”, Vol. 16, No. 1, Juni 2015.

Zulfa Ahmad, “Perhajian Di Abad-19 dan Awal Abad-20 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia”, *AT-TA'LIM*; Vol. 3, Tahun 2012.